

ABSTRAK

Peraturan daerah merupakan produk hukum yang tertulis dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menilai apakah perda masih sesuai atau tidak maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, muncul permasalahan bagaimanakah pelaksanaan evaluasi perda agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan apakah evaluasi peraturan daerah di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Kemudian dianalisis menggunakan penalaran logika deduktif yang bersifat evaluatif.

Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan bahwa Pelaksanaan evaluasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat adalah evaluasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, evaluasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat juga harus dilaksanakan dengan metode dan teknik yang tepat dengan cara menggunakan model evaluasi yang sesuai dengan ketentuan norma perda yang akan dievaluasi serta relevan dengan peristiwa dan masalah yang dihadapi masyarakat. Evaluasi yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut dapat disarankan pembentukan tim evaluasi dan pembentukan pedoman teknis tentang evaluasi peraturan daerah.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah, Evaluasi, DPRD

ABSTRACT

Local regulations are written legal products that are required to adjust to the needs of the people. To be able to assess whether the regional regulation is still appropriate or not, an evaluation is needed. Evaluation is an objective, systematic, and empirical examination of the effects of public policies and programs on the target in terms of the objectives to be achieved. Therefore, the problem arises as to how the implementation of local regulation evaluates to suit the needs of the community, and whether the evaluation of local regulations in Pamekasan Regency is in accordance with the laws and regulations.

The research method used in this study is the normative research method with the method of legislation approach and conceptual approach using primary, secondary, and non-legal legal materials. Then analyzed using deductive logic reasoning that is evaluative.

Based on the results of the study produced that the evaluation that meets the needs of the people is an evaluation carried out in accordance with the provisions of the legislation. In addition, evaluations that meet the needs of the people must also be carried out with appropriate methods and techniques by using an evaluation model that is in accordance with the provisions of local regulations that will be evaluated and relevant to the events and problems faced by the people. Evaluations carried out in Pamekasan Regency are in accordance with the attachment to Law Number 12 of 2011 concerning Establishment of Legislation. Based on this, it is recommended that an evaluation team be formed and the establishment of technical guidelines for evaluating local regulations.

Keywords: Local Regulation, Regional Government, Evaluation, DPRD